

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-1025/K/SU/2011
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2012

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan rencana strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2010-2014 perlu dijabarkan lebih lanjut dengan perencanaan yang berskala tahunan;
- b. bahwa agar penyusunan rencana kegiatan tahunan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terarah dan terpadu perlu dibuat kebijakan pengawasan dan pembinaan tahunan sebagai rambu-rambu penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan BPKP Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-955/K/SU/2011;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan BPKP Tahun 2012 yang menjadi arah dan rambu-rambu penyusunan perencanaan pengawasan dan kegiatan pengawasan dan pembinaan bagi seluruh unit diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penanggungjawab program/kegiatan diwajibkan menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pembinaan sebagai pelaksanaan kerja BPKP dan tanggung jawabnya berdasarkan Kebijakan Pembinaan BPKP;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2011

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd
MARDIASMO

KATA PENGANTAR

Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan (Jakwasbin) merupakan arah atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan utama pengawasan BPKP selama satu tahun. Jakwasbin juga merupakan upaya menerjemahkan rencana strategis ke dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan yang mendukung upaya terlaksananya berbagai program pemerintah serta untuk memastikan pelaksanaan tugas dan pencapaian target pembangunan pemerintah.

Selain memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), penyusunan Jakwasbin ini juga dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan arahan Presiden dan Wakil Presiden serta *current issues* yang berskala nasional/regional.

Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan sesuai kebijakan pengawasan dan pembinaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan oleh Presiden selaku *shareholder* BPKP maupun pihak lain sebagai *stakeholder* BPKP.

Akhir kata, semoga dengan pelaksanaan Jakwasbin ini, mampu memperkuat komitmen BPKP terhadap agenda terwujudnya kinerja dan peningkatan akuntabilitas keuangan negara. Selamat bekerja, terima kasih.

Jakarta, 1 Agustus 2011
Kepala BPKP
ttd
MARDIASMO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	
2	
A. UMUM	2
B. KEKUATAN DAN PELUANG	5
C. STRATEGI	6
ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BPKP	10
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2012	
Lampiran 2: Kerangka Acuan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2012	
Lampiran 3: Target Pengawasan dan Pembinaan BPKP Tahun 2012	

PENDAHULUAN

Dalam RPJM Nasional tahun 2010 -2014 dimuat Visi dan Misi dari Presiden terpilih yang dituangkan dalam tiga agenda strategi pembangunan. Ketiga agenda tersebut adalah menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera.

BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan Auditor Presiden/Pemerintah yang kredibel dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dituntut untuk mampu mendorong keberhasilan pencapaian tiga agenda strategi pembangunan dan mampu memahami kebutuhan Presiden. BPKP harus dapat menghasilkan informasi pengawasan yang bersifat *early warning system* (sistem peringatan dini) kepada Presiden beserta Pimpinan Lembaga Eksekutif lainnya. Informasi dimaksud digunakan untuk keperluan *continuing improvement* (perbaikan berkelanjutan) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga rencana yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memenuhi tuntutan dan kewajiban tersebut, BPKP harus tanggap dan harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi.

Untuk itu diperlukan penyusunan perencanaan terpadu untuk mengimplementasikan kesinambungan dan keterkaitan antara perencanaan strategik dengan perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) tahunan.

Kebijakan pengawasan akan menjadi arahan tahunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan menentukan apa yang menjadi obyek pengawasan tahunan BPKP, berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Penegasan arah kebijakan pengawasan dan pembinaan selama satu tahun
2. Pokok-pokok pengawasan dan pembinaan selama satu tahun
3. Arah pengalokasian sumber daya.

LATAR BELAKANG

A. UMUM

Kondisi yang terjadi di lingkungan BPKP menjadi tantangan ke depan untuk dapat melakukan tindakan nyata dan membuktikan bahwa BPKP mempunyai peran strategis dalam memberikan bantuan kepada Presiden atas penyelenggaraan pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 UUD 1945 harus didukung oleh BPKP dalam melakukan pengendalian atas jalannya pemerintahan yang dalam tataran operasional dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Untuk dapat memberi nilai tambah pada setiap kegiatan pengawasan, maka BPKP menyusun Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan yang relevan bagi peningkatan kinerja pemerintah, dengan memperhatikan amanah yang diberikan kepada BPKP dan peraturan perundang-undangan yang harus dikawal oleh BPKP sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menetapkan BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan:
 - a. Pengawasan Intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu meliputi: a) kegiatan yang bersifat lintas sektoral, b) kegiatan kebendaharaan umum negara (termasuk rewiu LKPP), serta c) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden - Pasal 49 ayat 2;
 - b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi: a) penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, b) sosialisasi SPIP, c) pendidikan dan pelatihan SPIP, d) pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah -Pasal 59;
 - c. Secara berkala, BPKP menyusun dan dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Pasal 54 ayat 3;
 - d. BPKP melakukan rewiu atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden - Pasal 57 ayat 4.

Posisi dan peran BPKP paska terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta sesuai visinya sebagai “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”, perlu diaktualisasikan dengan langkah-langkah nyata melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh BPKP.

Tahun anggaran 2012 merupakan tahun kelima sejak disahkannya PP 60 tahun 2008 yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Namun demikian, sejauh ini mandat tersebut belum dapat diimplementasikan dengan optimal karena instrumen regulasi pendukung kebijakan pembinaan penyelenggaraan SPIP masih dalam proses. Kelemahan ini baru diperbaiki pada tahun 2011, yang dalam tahun ini telah dimulai implementasi SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemda, terutama yang telah dilakukan *diagnostic assessment*, disamping Kementerian/Lembaga lain yang berdasarkan pertimbangan kesiapan dari internal mulai menerapkan SPIP, dengan demikian pada tahun 2012 diharapkan penerapan SPIP telah dilaksanakan pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemda.

Dengan adanya mandat baru BPKP ini yang didalamnya termasuk fungsi pembinaan SPIP maka kebijakan ini disebut kebijakan pengawasan intern dan pembinaan (Jakwasbin).

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, yang menginstruksikan kepada BPKP untuk melaksanakan:
 - a. Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemda untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola;
 - b. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemda, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran;
 - c. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini; dan
 - d. Rencana aksi yang jelas, tepat, dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemda.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan kepada seluruh instansi/ lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menetapkan program dan wilayah yang menjadi tanggungjawab sebagai wilayah bebas korupsi, memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi, dan meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan ini menjadikan BPKP c.q. Perwakilan BPKP sebagai bagian dari Tim Nasional dan Tim Daerah untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
5. Arahan Presiden dan Wakil Presiden Dalam berbagai kesempatan baik Presiden dan Wakil Presiden telah menyampaikan arahan kepada BPKP dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya untuk:
 - a. Dapat berperan dan berfungsi sebagai lembaga internal auditor pemerintah yang efektif.
 - b. Bekerjasama dan meningkatkan kerjasama kepada jajaran pemerintah, kementerian/lembaga dan daerah.
 - c. Bersinergi dan berkoordinasi serta melakukan sinkronisasi dengan BPK, dan lembaga-lembaga internal auditor di pemerintah lainnya.
 - d. Memberi atensi khusus terhadap pengawasan pengadaan barang dan jasa terutama di kementerian/lembaga/pemda yang anggarannya besar karena rawan penyimpangan.
 - e. Fokus pada pengelolaan keuangan daerah di Pemprov/Kab/ Kota karena banyak pimpinan daerah belum memahami administrasi pengelolaan keuangan daerah.
 - f. Memberikan pendampingan bagi kementerian/lembaga/pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan negara.
 - g. Fokus membantu kementerian/lembaga/pemda yang mendapatkan opini *Disclaimer* agar berubah menjadi opini yang lebih baik (target opini WTP 2012).
 - h. Memberikan asistensi kepada daerah atas pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan.
 - i. Penunjukan Kepala BPKP sebagai Ketua Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional dalam Rapat Komite Pengarah

Reformasi Birokrasi Nasional yang diketuai Wakil Presiden RI pada 3 November 2010.

- j. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dilakukan secara komprehensif dan terpadu, sehingga sinergi UKP4, Bappenas dan BPKP perlu ditingkatkan.

6. *Current Issues*

Peran BPKP dalam menangani *current issues* adalah dengan memberikan solusi terhadap permasalahan atau *issues* yang berskala nasional/regional yang sifatnya sektoral/lintas sektoral dan sangat penting atau akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peran ini dilakukan melalui evaluasi/revisi atas kebijakan program/ kegiatan.

B. KEKUATAN DAN PELUANG

Untuk menjalankan amanah tersebut di atas beberapa kekuatan dan peluang yang perlu diperhatikan adalah:

Kekuatan BPKP:

1. SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya yang tersebar di 25 perwakilan seluruh Indonesia.
2. Core competency unggulan di bidang pengawasan.
3. Memiliki mandat:
 - lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategik.
 - pembinaan penyelenggaraan SPIP.
 - penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional ke Presiden.
 - pembinaan penyelenggaraan JFA.
4. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari *top executive* BPKP.
5. Peran BPKP yang bertanggung-jawab langsung ke Presiden.
6. Memiliki produk-produk unggulan yang dibutuhkan *stakeholder* (GCG, KPI, PE, FCP, SAKD, MR).
7. Memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni.

Peluang BPKP:

1. Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, Wakil Presiden termasuk *stakeholders* lainnya.
2. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (*clean government and good governance*).
3. Meningkatnya permintaan jasa pengawasan (*assurance*) dan asistensi (*consulting*) dari instansi pemerintah.
4. Adanya kepercayaan atas BPKP yang profesional.
5. Banyaknya satker yang belum menerapkan tata kelola yang baik.
6. Munculnya peran-peran baru sehubungan dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008.
7. Besarnya kepercayaan instansi penyidik kepada BPKP untuk melakukan audit investigatif atas kasus TPK.

Namun demikian BPKP perlu mencermati pula kelemahan dan ancaman yang ada sebagai berikut:

Kelemahan BPKP:

1. Rekrutmen dan proses regenerasi SDM belum berjalan dengan baik.
2. Komposisi SDM belum ideal.
3. Auditor belum terspesialisasi menurut kebutuhan kinerja pengawasan.
4. Strategi pengawasan belum memadai.
5. Sistem promosi dan karier belum cukup mendorong motivasi kerja pegawai BPKP.

Ancaman bagi BPKP:

1. Masih adanya sebagian kelompok birokrasi yang belum memahami dan belum dapat menerima pentingnya peran BPKP yang baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.
2. Masih munculnya dissinkronisasi peraturan-peraturan yang kurang mendukung peran BPKP.
3. Tingginya minat dan permintaan tenaga BPKP yang potensial dari instansi pemerintah di luar BPKP.
4. Munculnya alternatif penyedia jasa dari konsultan independen atau pihak lain yang produknya sejenis dengan produk BPKP.
5. Adanya potensi perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan RPJMN 2010-2014 yang perlu diantisipasi.
6. Adanya pengembangan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Selanjutnya dengan memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman terhadap BPKP maka perlu di susun strategi bagi pencapaian tujuan.

C. STRATEGI

Strategi BPKP Tahun 2012 diharapkan dapat memenuhi kepentingan pihak luar dan membenarkan ke dalam. Sebagaimana konsep *Balanced Scorecard* (BSC) yang ditetapkan dalam renstra BPKP 2010-2014, maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak *stakeholders* utama dan manfaat kepada *auditan*/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam.

Strategi BPKP Tahun 2012, meliputi:

1. Strategi Pengawasan yang Tepat Dalam posisi sebagai auditor Presiden, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian BPKP adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional.

a) *Product Differences*

Kekuatan BPKP tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral), mendapat perhatian publik serta menjadi isu terkini, yang merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Inpres 4 tahun 2011. Tugas BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat.

b) *Market Differences*

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali dengan baik siapa *market*-nya BPKP. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai *shareholders* utama dan *stakeholders* birokrasi yang lain yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP.

c) *Methodology Differences*

Dengan *new* BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat misalnya program *evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit, internal control review*.

BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun *simptom-simptom* kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara dan mampu memberikan rekomendasi yang *applicable* kepada Presiden. Untuk itu diperlukan strategi pengawasan yang tepat, baik

dari sisi pemilihan obyek pengawasan dengan menerapkan skala prioritas pengawasan maupun dari sisi metode pengawasan yang harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pemberian informasi yang relevan bermanfaat kepada Presiden atau *stakeholders* lainnya.

2. Strategi penyusunan perencanaan secara terpadu

Perencanaan terpadu diperlukan untuk mengimplementasikan kesinambungan dan keterkaitan antara perencanaan strategik dengan perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*) tahunan dan jadwal yang ketat yang berorientasi pada penyediaan informasi yang tepat waktu.

Perencanaan pengawasan berbasis risiko menjadi salah satu solusi dalam menentukan prioritas pengawasan, mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan, dan dampak kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat. Keberhasilan strategi ini perlu didukung koordinasi yang intens antar kedeputian di lingkungan BPKP.

Perencanaan berbasis risiko ini dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.

3. Koordinasi dan Sinergi Pengawasan Nasional

Kebijakan Pengawasan Nasional berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada pada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antar aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergi pengawasan.

4. Pengembangan kapasitas pengawasan intern pemerintah

a. Mengembangkan pembinaan tata kelola APIP dalam kerangka mewujudkan peran APIP yang efektif berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 59 ayat (1) huruf e. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dengan penekanan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, yaitu:

1) Penyusunan materi pembinaan dalam bentuk peraturan, pedoman, manual, petunjuk pelaksanaan, *practice advisory*, buku / booklet mengenai tata kelola APIP yang Baik.

2) Sosialisasi, konsultasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan dan workshop dalam rangka implementasi tata kelola APIP yang baik.

3) Penguatan sinergi pengawasan intern pemerintah dengan melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif serta pembentukan komite kebijakan dan pembinaan dengan para Pimpinan APIP dan *stakeholders* lainnya.

4) Pengembangan sistem dan penyelenggaraan peer review APIP.

b. Melanjutkan kesinambungan pembinaan Auditor berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, yaitu:

1) Strategi ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah APIP yang menerapkan JFA.

2) Strategi intensifikasi dengan penekanan pada:

a) Perbaiki struktur dan komposisi SDM Pengawasan dengan meningkatkan jumlah Auditor berlatar belakang pendidikan akuntansi.

- b) Peningkatan kompetensi Auditor dan SDM Pengawasan lainnya dengan penekanan pada skill yang diperlukan dalam melaksanakan tugas - tugas pengawasan melalui workshop teknis substansi dan manajemen pengawasan.
- 3) Strategi peningkatan proses bisnis pembinaan berbasis web, yaitu e-sertifikasi dan e-PPAK dengan mengembangkan metode penilaian angka kredit serta sistem penyelenggaraan diklat dan ujian sertifikasi.

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BPKP

Kebijakan pengawasan dan pembinaan BPKP tahun 2012 dimaksudkan untuk menjadi landasan kegiatan dalam mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra BPKP 2010-2014, yang tercermin pada indikator hasil program untuk lingkup kegiatan pengawasan dan pembinaan. Kegiatan dalam kebijakan pengawasan tidak terlepas dari mandat yang harus dijalankan oleh BPKP sehingga kebijakan pengawasan tahun 2012 memperhatikan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kegiatan/Program Lintas Sektoral dan Kegiatan Strategis

Sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat 2 (a) PP Nomor 60/2008, yang dimaksud dengan kegiatan lintas sektoral adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh APIP kementerian/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. Dalam pengertian ini, kegiatan lintas sektoral dapat mencakup program pemerintah yang melibatkan BUMN/D, serta badan hukum lain karena adanya kebijakan pemerintah.

Dalam menyusun kebijakan pengawasan BPKP perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. **Strategis:** pengawasan lintas sektoral difokuskan pada program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini, yang berdampak pada "percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat" sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.
- b. **Signifikan:** pengawasan lintas sektoral difokuskan pada program/kegiatan prioritas pembangunan nasional.
- c. **Material:** pengawasan lintas sektoral difokuskan pada program/kegiatan yang dominan secara kuantitatif (besarnya anggaran) dan kualitatif (luas cakupan kegiatan/dampak kegiatan).

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ini diperlukan peningkatan sinergitas antara UKP4, Bappenas dan BPKP dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang komprehensif dan terpadu sesuai arahan Wakil Presiden.

Penetapan ruang lingkup memperhatikan antara lain:

- a. Risiko yang melekat pada program/kegiatan.
 - b. *Current Issues*, yaitu program yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini.
 - c. Arahan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara.
 - d. Pelayanan publik yang merupakan tugas/fungsi lintas kementerian/daerah.
 - e. Program-program lintas sektoral yang berkaitan dengan pemerintah daerah antara lain:
 - 1) Urusan Wajib pada pemerintah daerah.
 - 2) Kegiatan dari kementerian ke daerah yang pelaksanaannya dilakukan pemerintah daerah.
 - 3) Kegiatan yang terkait dengan kegiatan pemerintah pusat yang didanai juga oleh APBD sebagai pendamping.
 - 4) Kegiatan yang merupakan program bersama dari beberapa provinsi/kabupaten/kota.
 - 5) Kegiatan yang *outcome*-nya merupakan agregasi se-provinsi.
 - 6) Permasalahan yang menyangkut aset hasil pemekaran daerah.
- ### 2. Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara
- Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara adalah proses kegiatan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa *control, risk management* dan *governance process* atas

pengelolaan negara dapat memenuhi standar (*best practice*) dan meningkat secara berkelanjutan, sehingga keuangan negara benar-benar digunakan dengan efisien, transparan dan bertanggungjawab serta adil dan patut untuk mencapai tujuan bernegara.

Dalam pasal 49 ayat 2 (b) PP Nomor 60/2008 dinyatakan bahwa pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang dilakukan BPKP atas Kebendaharaan Umum Negara dilakukan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendaharaan Umum Negara.

Penetapan ruang lingkup pengawasan kegiatan BUN memperhatikan antara lain:

- a. Permasalahan kegiatan kebhendahaaran umum negara yang diidentifikasi mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. Permasalahan kegiatan kebhendahaaran umum negara yang bernilai strategis, material dan signifikan.
 - c. *Current Issues*, yaitu program yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini.
 - d. Risiko yang melekat atas kewenangan BUN yang berdampak besar terhadap pengelolaan keuangan negara.
 - e. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemda, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran.
3. Pengawasan Berdasarkan Penugasan Presiden
- Ruang lingkup pengawasan intern terhadap kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden ditetapkan di dalam penugasan spesifik dari Presiden terkait dengan hal-hal yang menjadi perhatian utama Presiden, dapat mencakup:
- a. Kegiatan yang tidak termasuk dalam rencana pengawasan atas kegiatan lintas sektoral dan kebhendahaaran umum, namun tetap memperhatikan hal yang bersifat strategis seperti *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga/pemda.
 - b. Hasil pengawasan kegiatan lintas sektoral dan kebhendahaaran umum yang memerlukan pendalaman/follow up berdasarkan Penugasan Presiden.
 - c. Kegiatan lain yang sifatnya harus segera dilaksanakan atas instruksi Presiden (*crash program*).
- Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam pemerintahan merupakan perhatian Presiden, yang meliputi pengawasan intern berikut:
- a. Pengawasan intern untuk memenuhi permintaan para stakeholder BPKP baik kementerian, lembaga maupun pemda.
 - b. Pengawasan intern atas kegiatan dalam tata pengelolaan korporasi negara.
 - c. Pengawasan intern yang bersifat investigatif atas kegiatan-kegiatan tertentu dan upaya-upaya untuk menciptakan pencegahan terjadinya tindak kecurangan.
4. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Dalam rangka menjalankan tugas pada pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu BPKP adalah pembina penyelenggaraan SPIP dan Inpres 4 Tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, maka berikut adalah hal-hal yang harus dilaksanakan:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang jelas, tepat, dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemda terutama terkait pemberian asistensi kepada kementerian/lembaga/ pemda, untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan

keuangan negara/daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola sebagaimana diamanahkan dalam Inpres 4 Tahun 2011.

- b. BPKP melakukan monitoring atas kegiatan pembimbingan dan sosialisasi SPIP.

Kegiatan tersebut diatas sekaligus mendukung pelaksanaan Quality Assurance Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/ pemda.

Kebijakan pengawasan dan pembinaan BPKP sebagaimana diuraikan di atas diarahkan untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas keuangan negara melalui 4 perspektif yang meliputi:

1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Opini laporan keuangan yang diberikan oleh BPK, merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Laporan keuangan yang baik disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan dikelola dengan kompetensi aparat pengelola pemerintahan yang profesional. Masyarakat publik menuntut transparansi pengelolaan keuangan negara dari para penyelenggara negara, dan dimediasi dengan sarana laporan keuangan yang memadai pengungkapannya, dan disajikan dengan nilai yang wajar serta sesuai dengan standar pencatatan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara

Struktur anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pemerintahan yang terdesentralisasi dengan sumber penganggaran pemerintah daerah yang masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat, mengharuskan penyediaan dana untuk dialokasikan kepada pemerintah daerah, selain itu dalam adanya arus dana yang cukup besar dalam pelaksanaan prioritas program pembangunan yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Pengelolaan dana ini harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pengelolanya, dan kementerian keuangan perlu memastikan akuntabilitas penggunaan dana tersebut sebagai bentuk akuntabilitas yang transparan.

3. Akuntabilitas Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tata pemerintahan yang baik yang baik dan bersih dari setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun institusi milik pemerintah lainnya dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan pemerintahannya, transparan dalam pengelolaan maupun pelaporannya, responsif dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan melayani seluruh lapisan masyarakat dengan adil dan seimbang serta dituntut untuk bersih dari penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaannya.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral dan Program Strategis.

Pelaksanaan prioritas program pembangunan yang dijalankan pemerintah melibatkan beberapa kementerian, lembaga dan institusi lainnya yang menuntut koordinasi yang efektif untuk memastikan berjalannya program pembangunan tersebut dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Prioritas pemerintah yang akan dijalankan Presiden dalam RPJMN 2010-2014, merupakan program yang sangat strategis dan dalam mencapai tujuan dalam prioritas tersebut melibatkan kegiatan dari beberapa institusi yang terkait sesuai dengan fungsinya serta mencakup beberapa wilayah sesuai jangkauan program pembangunannya. Akuntabilitas pencapaian tujuan program prioritas pembangunan, merupakan bidang yang kompleks, oleh karenanya perlu didorong agar Presiden dapat terbantu mempertanggungjawabkan pelaksanaan prioritas program tersebut kepada masyarakat sebagai konstituennya.

Dengan memperhatikan ruang lingkup pengawasan dan pembinaan di atas maka kebijakan pengawasan dan pembinaan SPIP diharapkan mampu untuk mewujudkan 4 perspektif akuntabilitas tersebut. Kebijakan pengawasan dan pembinaan SPIP BPKP tahun 2012 dan akuntabilitas yang ditujukan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern Atas Kegiatan Lintas Sektor dan Kegiatan Strategis dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral dan program strategis.
2. Pengawasan Intern Atas Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara untuk mewujudkan akuntabilitas kebhendaharaan umum negara.
3. Pengawasan Berdasarkan Penugasan Presiden dan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas tata pemerintahan yang baik dan bersih serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kebijakan pengawasan dan pembinaan SPIP ini dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran 1 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan BPKP tahun 2012 dan Lampiran 2 tentang Kerangka Acuan Pengawasan dan Pembinaan SPIP tahun 2012. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan SPIP ini tetap mengacu pada target pengawasan dan pembinaan SPIP tahun 2012 sesuai Renstra 2010-2014 sebagaimana terdapat pada Lampiran 3.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUN 2012

Pokok-pokok kebijakan pengawasan dan pembinaan BPKP tahun 2012 adalah sebagai berikut:

I. PENGAWASAN INTERN ATAS KEGIATAN LINTAS SEKTORAL DAN KEGIATAN STRATEGIS

Kebijakan pengawasan intern tersebut di atas akan diwujudkan melalui tema/ kegiatan pengawasan intern sebagai berikut:

- 1) Program dan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan
- 2) Gerakan Nasional Revitalisasi Kakao Kementerian Pertanian
- 3) Pengelolaan Bantuan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin)
- 4) Kinerja BUMN Perkebunan (Khususnya Komoditi Gula)
- 5) Pelayanan Medik Spesialistik kepada Masyarakat
- 6) Peran BUMN Bidang Kehutanan dalam Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
- 7) PSO Air Bersih
- 8) Pelayanan Kesehatan
- 9) Pengelolaan BOS KITA pada Kementerian Pendidikan Nasional RI
- 10) Pengelolaan Kelistrikan
- 11) Pengelolaan Program PNPM
- 12) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)
- 13) Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan
- 14) Penerapan E-KTP
- 15) Pelayanan Kredit/Pembiayaan Bank
- 16) Pelayanan Pemerintah Daerah
- 17) Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian dan Lembaga
- 18) Keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN
- 19) Sistem Deteksi Dini Pemerintah Daerah
- 20) Kegiatan Prioritas Pembangunan-UKP4
- 21) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai Instruksi Presiden
- 22) Pelayanan Publik pada Perwakilan RI di Luar Negeri
- 23) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
- 24) Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah
- 25) Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)
- 26) Pengelolaan Otorita Batam dan BTIP
- 27) Program Kementerian/Lembaga yang bersifat Lintas Sektor
Lainnya serta Pengawasan atas permintaan Presiden Lainnya
- 28) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

II. PENGAWASAN INTERN ATAS KEGIATAN KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA

Kebijakan pengawasan intern tersebut di atas akan diwujudkan melalui tema/ kegiatan pengawasan intern sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Tagihan Pemerintah
- 2) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer ke Daerah
- 3) Kemampuan Membayar Dividen BUMN
- 4) Optimalisasi Penerimaan Negara
- 5) Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 6) Pengawasan atas penghematan biaya (*cost saving*) KKKS/KPS dan JOC serta TAC/KSO dan UBPEP

III. PENGAWASAN INTERN ATAS KEGIATAN YANG MENJADI PERHATIAN PRESIDEN

III.1. PENGAWASAN INTERN ATAS PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan pengawasan intern tersebut di atas akan diwujudkan melalui tema/ kegiatan pengawasan intern sebagai berikut :

- 1) Kajian Standar Pelayanan Prima
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan
- 3) Penyusunan Standar Operating Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan
- 4) Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5) Evaluasi APBD
- 6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 7) Sistem Informasi Manajemen Daerah
- 8) PDAM dan BUMD Lainnya
- 9) Reviu LKPP bidang Perekonomian
- 10) Pengawasan atas Program/proyek yang dibiayai dari Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN)
- 11) Procurement Review
- 12) Pengelolaan BMN dan Optimalisasi Asset

III.2. PENGAWASAN INTERN ATAS PENGELOLAAN KORPORASI NEGARA

Kebijakan pengawasan intern tersebut di atas akan diwujudkan melalui tema/ kegiatan pengawasan intern sebagai berikut:

- 1) *Good Corporate governance* (GCG)
- 2) *Key Performance Indicator* (KPI)
- 3) Manajemen Risiko (MR)
- 4) *Internal Control* COSO
- 5) Audit Kinerja pada PDAM
- 6) Audit Kinerja pada PD Lainnya
- 7) Audit Kinerja pada BPR
- 8) Pelayanan pada RSUD
- 9) *Public Service Obligation* Bidang Pangan
- 10) *Public Service Obligation* Bidang transportasi

III.3. PENGAWASAN INTERN ATAS PENGELOLAN PEMERINTAHAN LAINNYA

Kebijakan pengawasan intern tersebut di atas akan diwujudkan melalui tema/ kegiatan pengawasan intern sebagai berikut :

- 1) Implementasi SOP
- 2) Audit Reklamasi Lahan Eks Tambang
- 3) Audit Peningkatan Produktivitas daging Kementerian Pertanian
- 4) Audit Kinerja Subsidi Benih dan Pupuk
- 5) Pengadaan barang dan Jasa
- 6) Efektivitas Program Pembangunan
- 7) Audit atas Pelaksanaan Program-Program Otorita Asahan
- 8) Kinerja Kementerian/Lembaga
- 9) Evaluasi Kegiatan Badan Pengelola Kawasan Otorita Batam
- 10) Pengawasan atas *Current Issues*
- 11) Pengawasan atas Evaluasi LAKIP pada Kementerian/Lembaga
- 12) Permasalahan Tertentu
- 13) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
- 14) Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga
- 15) Pelaksanaan Peraturan Daerah tertentu
- 16) Pengelolaan Risiko/*Risk Management*
- 17) Pengawasan atas permintaan presiden lainnya
- 18) Pengawasan atas permintaan *stakeholder* lainnya

- 19) Profil K/1/IPD/ dan PASS
- 20) Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

III.4. PENGAWASAN INTERN UNTUK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Kebijakan pengawasan intern tersebut di atas akan diwujudkan melalui tema/ kegiatan pengawasan intern sebagai berikut:

- 1) Program Anti Korupsi
- 2) Penyamaan Persepsi
- 3) Penerapan *Fraud Control Plan* (FCP)
- 4) Kajian Pengawasan
- 5) Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
- 6) Eskalasi Klaim
- 7) Investigasi atas Tindak Pidana Korupsi
- 8) Perhitungan Kerugian Negara
- 9) Pemberian Keterangan Ahli
- 10) Audit Investigatif atas permintaan instansi lain
- 11) *Peer Review* atas laporan penugasan investigatif
- 12) Reviu terhadap laporan pengaduan masyarakat

IV. PEMBINAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pembinaan SPIP merupakan mandat BPKP dalam PP 60 tahun 2008 dan dilakukan dengan kebijakan pembinaan penerapan SPIP, pembinaan SPIP melalui pendidikan dan pelatihan SPIP dan pembinaan SPIP melalui peningkatan kompetensi auditor APIP

IV.1. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

Kebijakan pembinaan dilakukan untuk mendorong institusi pemerintah dapat menerapkan sistem pengendalian intern melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
- 2) Bimbingan dan konsultasi SPIP
- 3) Sosialisasi SPIP

IV.2. PEMBINAAN SPIP MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SPIP

Kebijakan pembinaan dilakukan untuk membentuk aparat penyelenggara pemerintahan yang mengerti dan dapat menerapkan SPIP melalui pembekalan yang intensif dalam pendidikan dan pelatihan SPIP. Peserta pelatihan meliputi baik pejabat pemerintahannya maupun seluruh staf pemerintahan karena pentingnya peran manusia sebagai soft control dalam SPIP.

IV.3. PEMBINAAN SPIP MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR APIP

Kebijakan peningkatan kompetensi auditor APIP dilakukan dengan:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Auditor APIP
- 2) Workshop/Seminar
- 3) Penerapan JFA
- 4) Penguatan identitas profesi
- 5) Fasilitasi Pengusulan Penyesuaian Tunjangan JFA/Perpanjangan Batas Usia Pensiun Auditor
- 6) Penerapan Tata Kelola APIP
- 7) Pengembangan Profesi
- 8) Peningkatan Sertifikasi Auditor
- 9) Penilaian angka kredit

- 10) Kegiatan lain-lain dalam rangka peningkatan kompetensi (Konsultasi/Bimtek Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada APIP atau Sinergi Audit dengan APIP)
- 11) Pengelolaan Sistem Dukungan

Butir-butir kebijakan pengawasan dan pembinaan tahun 2012 diatas akan dilaksanakan melalui dua program dalam renstra yakni:

- 1) Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan sisitem pengendalian intern pemerintah
- 2) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

KERANGKA ACUAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BPKP TAHUN 2012

Program_ Renstra/Jakwas/Tema_Pengawasan/Penugasan		IOC Renstra	Penanggung Jawab
1	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
1	PENGAWASAN INTERN ATAS KEGIATAN LINTAS SEKTORAL DAN KEGIATAN STRATEGIS		
	1	Program dan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan:	
	1	Audit Kinerja pada Kementerian Pertanian	Lintas Sektoral D1
	2	Evaluasi Kebijakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Lintas Sektoral D1
	2	Gerakan Nasional Revitalisasi Kakao	
	1	Audit Operasional Gerakan Nasional Revitalisasi Kakao Kementerian Pertanian	Lintas Sektoral D1
	3	Pengelolaan Bantuan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin):	
	1	Audit Kinerja/operasional pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	Dimanfaatkan Presiden D2
	2	Penyusunan Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Bantuan Raskin pada Kemenko Bidang Kesra	Dimanfaatkan Presiden D2
	3	Piloting Audit Operasional atas Bantuan Raskin pada Kemenko Bidang Kesra	Dimanfaatkan Presiden D2
	4	Kompilasi Hasil Audit Operasional atas Bantuan Raskin pada Kemenko Bidang Kesra	Dimanfaatkan Presiden D2
	4	Kinerja BUMN Perkebunan (Khususnya Komoditi Gula)	
	1	Evaluasi Kebijakan/Kajian Pengawasan Kinerja BUMN Perkebunan (Khususnya Komoditi Gula)	Dimanfaatkan Presiden D5
	5	Pelayanan Medik Spesialistik kepada Masyarakat	
	1	Evaluasi Pelayanan Medik Spesialistik kepada Masyarakat	Lintas Sektoral D5
	6	Peran BUMN Bidang Kehutanan dalam Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	
	1	Evaluasi Kebijakan/Kajian Pengawasan Peran BUMN Bidang Kehutanan dalam Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Dimanfaatkan Presiden D5
	7	PSO Air Bersih	
	1	Assessment PSO Air Bersih	Dimanfaatkan Presiden D5
	8	Pelayanan Kesehatan	
	1	Kajian Pelayanan Kesehatan oleh PT ASKES	Dimanfaatkan Presiden D5
	9	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS KITA) pada Kementerian Pendidikan Nasional RI	
	1	Audit Kinerja Pengelolaan BOS KITA pada Kementerian Pendidikan Nasional	Lintas Sektoral D2
	2	Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja Pengelolaan BOS KITA pada Kementerian Pendidikan Nasional RI	Lintas Sektoral D2

	10	Pengelolaan Kelistrikan		
	1	Kajian Kelistrikan	Dimanfaatkan Presiden	D5
	11	Pengelolan Program PNPM:		
	1	Audit Kinerja atas Program PNPM Mandiri pada Kemenko Bidang Kesra	Dimanfaatkan Presiden	D2
	2	Penyusunan Petunjuk Teknis Audit Kinerja atas Program PNPM Mandiri pada Kemenko Bidang Kesra	Dimanfaatkan Presiden	D2
	3	Monev Audit Kinerja atas Program PNPM Mandiri pada Kemenko Bidang Kesra	Dimanfaatkan Presiden	D2
	12	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)		
	1	Audit kinerja PIIP Tahun 2011	Lintas Sektoral	D1
	2	Interim Audit PIIP Tahun 2012	Lintas Sektoral	D1
	13	Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		
	1	Audit Kinerja Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan	Lintas Sektoral	D1
	14	Penerapan E-KTP		
	1	Pendampingan dan Penerapan E-KTP	Dimanfaatkan Presiden	D4
	15	Pelayanan Kredit/Pembiayaan Bank		
	1	Kajian atas Pelayanan Kredit/Pembiayaan Bank kepada Koperasi dan UMKM	Dimanfaatkan Presiden	D5
	16	Pelayanan Pemerintah Daerah:		
	1	Audit Kinerja Pemerintah Daerah	Pelayanan sesuai SPM	D4
	2	Validasi LHA Kinerja Pemerintah Daerah	Pelayanan sesuai SPM	D4
	17	Pengelolaan Dana Dekonsentrasi		
	1	Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi	Lintas Sektoral	D2
	2	Penyusunan/Revisi Pedoman Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi	Lintas Sektoral	D2
	3	Monitoring Pelaksanaan Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi	Lintas Sektoral	D2
	18	Keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN		
	1	Analisis dan Evaluasi Keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN	Lintas Sektoral	D4
	2	Monev Keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN	Lintas Sektoral	D4
	3	Kompilasi Laporan Keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN	Lintas Sektoral	D4
	4	Validasi Keselarasan RKPD dan RKP serta RPJMD dan RPJMN	Lintas Sektoral	D4
	19	Sistem Deteksi Dini		
	1	Kajian Sistem Deteksi Dini pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Lintas Sektoral	D4
	2	Piloting SIMDD-MPDD	Lintas Sektoral	D4
	3	Sosialisasi SIMDD-MPDD	Lintas Sektoral	D4
	20	Kegiatan Prioritas Pembangunan-UKP4:		
	1	Penyusunan Pedoman Monitoring Kegiatan	Dimanfaatkan	D2

			Prioritas Pembangunan	an Presiden	
		2	Monitoring Kegiatan Prioritas Pembangunan-UKP4	Dimanfaatkan Presiden	D2
		3	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Monitoring Kegiatan Prioritas Pembangunan-UKP4	Dimanfaatkan Presiden	D2
		4	Quality Assurance atas Penugasan	Dimanfaatkan Presiden	D2
		21	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai Instruksi Presiden		
		1	Sosialisasi/Asistensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai Instruksi Presiden	Dimanfaatkan Presiden	D4
		22	Pelayanan Publik pada Perwakilan RI di Luar Negeri		
		1	Evaluasi Pelayanan Publik pada Perwakilan RI di Luar Negeri	Lintas Sektoral	D2
		23	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)		
		1	Pedoman EKPPD	Pelayanan sesuai SPM	D4
		2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Pelayanan sesuai SPM	D4
		3	Validasi EKPPD	Pelayanan sesuai SPM	D4
		4	Penyusunan Laporan Nasional EKPPD	Pelayanan sesuai SPM	D4
		24	Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)		
		1	Pedoman Monitoring Evaluasi AKIP	Pelayanan sesuai SPM	D4
		2	Telaah Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP	Pelayanan sesuai SPM	D4
		3	Monitoring LHE AKIP Perwakilan BPKP	Pelayanan sesuai SPM	D4
		25	Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)		
		1	Sosialisasi Pedoman EKPOD	Pelayanan sesuai SPM	D4
		26	Pengelolaan Otorita Batam dan BTIP		
		1	Kajian pengawasan pada Otorita Batam dan BTIP	Dimanfaatkan Presiden	D1
		27	Program Kementerian/Lembaga yang bersifat Lintas Sektor Lainnya		
		1	Evaluasi Kebijakan dan Pengelolaan Program	Lintas Sektoral	D1
		2	Evaluasi Efektifitas Program	Lintas Sektoral	D4
		3	Penyusunan petunjuk teknis asistensi kerjasama daerah	Lintas Sektoral	D4
		4	Evaluasi Kebijakan Pinjaman Daerah	Lintas Sektoral	D4
		5	Audit pada Kementerian/Lembaga	Lintas Sektoral	D2
		6	Penyusunan Pedoman audit Program pada Kementerian/Lembaga yang bersifat Lintas Sektor	Lintas Sektoral	D2
		7	Monitoring Pelaksanaan Audit Program pada Kementerian/Lembaga yang bersifat Lintas Sektor	Lintas Sektoral	D2
		8	Piloting audit Program pada	Lintas	D2

			Kementerian/Lembaga yang bersifat Lintas Sektor	Sektoral	
		9	Sosialisasi Pedoman Audit Operasional pada Kementerian Pendidikan Nasional	Lintas Sektoral	D2
		28	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
		1	Quality Assurance atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dimanfaatkan Presiden	D2
		2	Sinergi dalam rangka percepatan reformasi birokrasi	Permintaan Stakeholder	D2
		2	PENGAWASAN INTERN ATAS KEGIATAN KEBENDAHARAAN UMUM NEGARA		
		1	Pengelolaan Tagihan Pemerintah:		
		1	Verifikasi Tagihan Pihak Ketiga yang akan dibebankan kepada APBN	Kebendaharaan Umum Negara	D2
		2	Audit Tagihan Charter Pesawat Presiden/Wakil Presiden	Kebendaharaan Umum Negara	D2
		2	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer ke Daerah		
		1	Desiminasi Pedoman DAK dan Dana Transfer ke Daerah	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		2	Piloting Monitoring DAK dan Dana Transfer ke Daerah	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		3	Monitoring DAK dan Dana Transfer ke Daerah	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		4	Quality Assurance atas Monitoring DAK dan Dana Transfer ke Daerah	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		5	Validasi Monitoring DAK dan Dana Transfer ke Daerah	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		6	Penyusunan Kompilasi Nasional Monitoring DAK dan Dana Transfer ke Daerah	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		7	Desiminasi Pedoman Advance Payment DAK Reimbursement TA 2011	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		8	Verifikasi Advance Payment DAK Reimbursement TA 2011	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		9	Validasi Advance Payment DAK Reimbursement TA 2011	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		10	Penyusunan Kompilasi Nasional Advance Payment DAK Reimbursement TA 2011	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		11	Desiminasi DAK Reimbursement TA 2011	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		12	Verifikasi DAK Reimbursement TA 2011	Kebendaharaan Umum Negara	D4
		13	Quality Assurance atas Verifikasi DAK	Kebendaharaan Umum Negara	D4

			Reimbursement TA 2011	a-an Umum Negara	
		14	Validasi DAK Reimbursement TA 2011	Kebendahar a-an Umum Negara	D4
		15	Kompilasi hasil Verifikasi DAK Reimbursement TA 2011	Kebendahar a-an Umum Negara	D4
		16	Monitoring Dana Otonomi Khusus	Kebendahar a-an Umum Negara	D4
		3	Kemampuan Membayar Dividen		
		1	Audit Kemampuan Membayar Dividen pada PT PN II	Kebendahar a-an Umum Negara	D5
		4	Optimalisasi Penerimaan Negara		
		1	Pemeriksaan Pajak	Peningkata n Penerimaan	D1
		2	Evaluasi Kajian	Peningkata n Penerimaan	D1
		5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):		
		1	Kajian identifikasi dan inventarisasi potensi PNBP	Peningkata n Penerimaan	D1
		2	Asistensi penerapan SOP Penerimaan Pajak, Bea Cukai dan PNBP	Peningkata n Penerimaan	D1
		3	Audit PNBP pada Kementerian/Lembaga	Peningkata n Penerimaan	D1
		4	Pemeriksaan pada Kementerian/Lembaga	Peningkata n Penerimaan	D1
		5	Penyusunan Pedoman Audit PNBP di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Peningkata n Penerimaan	D2
		6	Piloting Audit PNBP	Peningkata n Penerimaan	D2
		7	Audit atas Pengelolaan PNBP pada Perwakilan RI di Luar Negeri 1	Peningkata n Penerimaan	D2
		8	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Audit Operasional	Peningkata n Penerimaan	D2
		9	Audit Pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga	Peningkata n Penerimaan	D2
		6	KKKS/KPS dan JOC		
		1	Audit dengan tujuan tertentu atas KKKS/KPS dan JOC pada PT Pertamina <i>Geothermal Energy</i>	<i>Cost Saving</i>	D5
		7	TAC/KSO dan UBPEP		

		1	Audit operasional atas TAC/KSO dan UBPEP pada PT Pertamina EP	<i>Cost Saving</i>	D5
3	PENGAWASAN INTERN ATAS KEGIATAN YANG MENJADI PERHATIAN PRESIDEN: - PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN				
	1	Kajian standar pelayanan prima			
		1	Kajian standar pelayanan prima di BKPM	LK WDP	D1
	2	Penyusunan Laporan Keuangan:			
		1	Pendampingan Penyusunan pada Kementerian/Lembaga	LK WDP	D1
		2	Bimbingan Teknis/pendampingan Reviu Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga	LK WDP	D1
		3	Penyusunan Petunjuk Teknis Asistensi Penyusunan	LK WDP	D2
		4	Sosialisasi Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga	LK WDP	D2
		5	Monitoring pelaksanaan Asistensi/Bimtek Penyusunan LK pada KL	LK WDP	D2
		6	Pendampingan Reviu Laporan Keuangan	LK WDP	D2
		7	Asistensi/Bimtek Penyusunan LK pada Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam lainnya	LK WDP	D2
		8	Pendampingan rivi laporan keuangan	LK WDP	D5
	3	Standar Operating Prosedur			
		1	Pendampingan Penyusunan Standar Operating Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan	LK WDP	D2
	4	Pengelolaan Keuangan Daerah:			
		1	Pengembangan pedoman Akuntansi Keuangan Daerah	LK WDP	D4
		2	Pengembangan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	LK WDP	D4
		3	Diseminasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perwakilan BPKP	LK WDP	D4
		4	Kajian Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	LK WDP	D4
		5	Quality Assurance Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah pada Perwakilan BPKP	LK WDP	D4
	5	Evaluasi APBD			
		1	Kompilasi Evaluasi APBD 2011	LK WDP	D4
	6	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah:			
		1	Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda	LK WDP	D4
	7	Sistem Informasi Manajemen Daerah:			
		1	Asistensi Implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada Pemerintah Daerah	LK WDP	D4
		2	Pengembangan SIMDA	LK WDP	D4
		3	Workshop SIMDA	LK WDP	D4
	8	PDAM dan BUMD Lainnya:			
		1	Audit keuangan pada PDAM	LK WDP	D5
		2	Audit keuangan pada BUMD Lainnya	LK WDP	D5
		3	Bimtek/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan pada BUMD/BLUD/BUL	LK WDP	D5

		4	Sosialisasi pada BUMD/BLUD/BUL	LK WDP	D5
	9	Reviu LKPP			
		1	Reviu LKPP bidang Perekonomian	Opini BPK	D1
	10	Program/proyek yang dibiayai dari Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri (PHLN)			
		1	Audit keuangan PHLN	PHLN WTP	D1
		2	Audit kinerja PHLN	PHLN WTP	D1
		3	Audit atas eskalasi harga	PHLN WTP	D1
	11	Procurement Review			
		1	Procurement Post Review atas Proyek Pinjaman Bank Dunia	PHLN WTP	D1
		2	Reviu atas proses pengadaan Tahap Pra Kontrak yang didanai oleh PHLN	PHLN WTP	D1
	12	Pengelolaan BMN dan Optimalisasi Aset:			
		1	Inventarisasi aset pada Kementerian/Lembaga	LK WDP	D1
		2	Evaluasi Pemanfaatan BMN dan Kinerja	LK WDP	D2
		3	Kompilasi Laporan Pendampingan Inventarisasi BMN pada BNPB	LK WDP	D2
		4	Pendampingan Inventarisasi BMN Kementerian/Lembaga	LK WDP	D2, D5
		5	Kajian Optimalisasi Asset pada Perum Bulog	Kebendaharaan Umum Negara	D5
	4	PENGAWASAN INTERN ATAS KEGIATAN YANG MENJADI PERHATIAN PRESIDEN: - PENGELOLAAN KORPORASI NEGARA			
		1	Good Corporate governance (GCG):		
		1	Evaluasi GCG	GCG/KPI	D5
		2	Pembimbingan dan Konsultasi GCG	GCG/KPI	D5
		2	Key Performance Indicator (KPI)		
		1	Pengembangan/ Penyusunan Sistem KPI	GCG/KPI	D5
		2	Evaluasi KPI	GCG/KPI	D5
		3	Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan KPI	GCG/KPI	D5
		3	Manajemen Risiko (MR)		
		1	Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan Manajemen Risiko	GCG/KPI	D5
		4	Internal Control - COSO		
		1	Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan - COSO	GCG/KPI	D5
		5	Kinerja pada PDAM		
		1	Audit Kinerja pada PDAM	Kinerja BUMD	D5
		6	Kinerja pada PD Lainnya		
		1	Audit Kinerja pada PD Lainnya	Kinerja BUMD	D5
		7	Kinerja pada BPR		
		1	Audit Kinerja pada BPR	Kinerja BUMD	D5
		8	Pelayanan pada RSUD		
		1	Survey Pelayanan pada RSUD	Kinerja BUMD	D5
		9	PSO Bidang Pangan		
		1	Evaluasi efektivitas pelaksanaan PSO pada	PSO Baik	D5

			PT Pertani dan Sang Hyang Seri		
	10	PSO Bidang transportasi			
		1	Evaluasi efektivitas pelaksanaan PSO bidang transportasi pada PT Kereta Api Indonesia	PSO Baik	D5
	5	PENGAWASAN INTERN ATAS KEGIATAN YANG MENJADI PERHATIAN PRESIDEN: - PENGELOLAAN PEMERINTAHAN LAINNYA			
		1	Standar Operating Prosedur		
		1	Implementasi SOP Tambang Kementerian ESDM	Permintaan Stakeholder	D1
		2	Reklamasi Lahan		
		1	Audit Reklamasi eks tambang Kementerian Kehutanan	Permintaan Stakeholder	D1
		3	Peningkatan Produktivitas Daging		
		1	Audit Peningkatan Produktivitas daging Kementerian Pertanian	Permintaan Stakeholder	D1
		4	Kinerja Subsidi Benih dan Pupuk		
		1	Audit Kinerja Subsidi Benih dan Pupuk	Permintaan Stakeholder	D1
		5	Pengadaan barang dan Jasa		
		1	Pendampingan Reviu Pengadaan barang dan Jasa pada K/L	Permintaan Stakeholder	D1
		2	Sosialisasi/Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa pada K/L	Permintaan Stakeholder	D2
		6	Efektivitas Program Pembangunan		
		1	Evaluasi Efektivitas Program Pembangunan Perdagangan pada Kementerian Perdagangan	Permintaan Stakeholder	D1
		7	Pelaksanaan Program-Program Otorita Asahan		
		1	Audit atas Pelaksanaan Program-Program Otorita Asahan	Permintaan Stakeholder	D1
		8	Kinerja Kementerian/Lembaga		
		1	Audit Kinerja pada Bapeten	Permintaan Stakeholder	D1
		2	Petunjuk Teknis Audit Kinerja pada Bapeten	Permintaan Stakeholder	D1
		9	Evaluasi Kegiatan Badan Pengelola Kawasan Otorita Batam		
		1	Evaluasi Kegiatan BP Batam	Permintaan Stakeholder	D1
		10	Pengawasan atas Current Issues		
		1	Kajian atas Current Issues	Permintaan Stakeholder	D1
		11	Pengawasan atas Evaluasi LAKIP pada K/L		
		1	Pendampingan Evaluasi LAKIP pada K/L	Permintaan Stakeholder	D2
		12	Permasalahan Tertentu		
		1	Audit atas Permasalahan Tertentu pada Kemenkumham dan DPR	Permintaan Stakeholder	D2
		13	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara:		
		1	Audit Operasional atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara	Permintaan Stakeholder	D2
		2	Bimtek Audit Operasional	Permintaan Stakeholder	D2
		3	Audit atas Pengelolaan Keuangan Negara	Permintaan Stakeholder	D2

			pada Perwakilan RI di Luar Negeri	Stakeholder	
		4	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian Lembaga dan Non KL	Permintaan Stakeholder	D2
		14	Pelayanan Publik pada K/L		
		1	Evaluasi atas Pelayanan Publik Bidang Pertanahan	Permintaan Stakeholder	D2
		15	Pelaksanaan Peraturan Daerah tertentu		
		1	Monitoring pelaksanaan Perda sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PBB dan BPHTB)	Permintaan Stakeholder	D4
		16	Pengelolaan Risiko/Risk Management		
		1	Asistensi risk management	Kebendaharaan Umum Negara	D1
		17	Pengawasan atas permintaan Presiden Lainnya		
		1	Penyusunan Bahan retreat Presiden	Dimanfaatkan Presiden	D4
		2	Sosialisasi Directive Presiden	Dimanfaatkan Presiden	D4
		3	Pengawasan atas permintaan Presiden	Dimanfaatkan Presiden	D1,D2,D4, D5,D6
		18	Pengawasan atas permintaan stakeholder lainnya:		
		1	Audit/Evaluasi atas Program/Kegiatan K/L berdasarkan permintaan	Permintaan Stakeholder	D2
		2	Penyusunan Pedoman Audit atas Permintaan Stakeholders	Permintaan Stakeholder	D2
		3	Monitoring Kegiatan	Permintaan Stakeholder	D2
		4	Quality Assurance atas penugasan Tim BPKP	Permintaan Stakeholder	D2
		19	Profil K/L/IPD dan PASS		
		1	Penyusunan Profil PASs Kementerian/Lembaga	Permintaan Stakeholder	D1,D2,D4
		2	Penyusunan dan Pembahasan Database Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Profil Pemda)	Permintaan Stakeholder	D4
		3	Updating Profil Pemda	Permintaan Stakeholder	D4
		20	Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		
		1	Monitoring saldo temuan yang belum ditindaklanjuti pada K/L	Permintaan Stakeholder	D1,D2,D4, D5,D6
		2	Monitoring evaluasi kegiatan	Permintaan Stakeholder	D1,D2,D4, D5,D6
		3	Kompilasi Pemetaan dan Penyelesaian TPB Depdagri	Permintaan Stakeholder	D1,D2,D4, D5,D6
		6	PENGAWASAN INTERN ATAS KEGIATAN YANG MENJADI PERHATIAN PRESIDEN: - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI		
		1	Program Anti Korupsi:		
		1	Sosialisasi Program Anti Korupsi	Permasalahan -an Korupsi	D6
		2	Forum Investigasi	Permasalahan -an Korupsi	D6
		2	Penyamaan Persepsi		
		1	Penyamaan Persepsi	Permasalahan	D6

					-an Korupsi	
		2	Koordinasi		Permasalahan -an Korupsi	D6
		3	Pembinaan/ QA		Permasalahan -an Korupsi	D6
	3	Penerapan Fraud Control Plan (FCP):				
		1	Sosialisasi FCP		Implementasi FCP	D6
		2	Dianostic Assessment FCP		Implementasi FCP	D6
		3	Bimbingan Teknis FCP		Implementasi FCP	D6
		4	Evaluasi atas Implementasi FCP		Implementasi FCP	D6
		5	Monitoring dan Tindaklanjut FCP		Implementasi FCP	D6
	4	Kajian Pengawasan				
		1	Kajian Pengawasan		Koreksi Kebijakan	D6
	5	Investigasi HKP				
		1	Audit Investigasi HKP		Terselesaikan-nya HKP, Klaim, Eskalasi	D6
	6	Eskalasi Klaim				
		1	Audit Eskalasi Klaim		Terselesaikan-nya HKP, Klaim, Eskalasi	D6
		2	Pemantauan Tindak Lanjut HKP, Klaim dan Eskalasi		Terselesaikan-nya HKP, Klaim, Eskalasi	D6
	7	Investigasi atas TPK				
		1	Audit Investigasi atas TPK		Penyerahan Kasus	D6
	8	PKKN				
		1	PKKN		Penyerahan Kasus	D6
	9	PKA				
		1	PKA		Penyerahan Kasus	D6
	10	Investigatif atas permintaan instansi lain				
		1	Audit Investigatif atas permintaan instansi lain		AI Ditindaklanjuti	D6
	11	Peer Reviu atas laporan penugasan investigative				
		1	Peer Reviu atas laporan penugasan investigatif		LAI memenuhi standar	D6
		2	Pemantauan Tindak Lanjut			
	12	Reviu terhadap laporan pengaduan masyarakat				
		1	Reviu terhadap laporan pengaduan masyarakat		Pengaduan di TL	D6
	7	PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP				

	1	Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP		
	1	Penyusunan Pedoman/Juknis SPIP	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2,D4
	2	Bimbingan Teknis dan Konsultasi SPIP		
	1	Bimtek SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemda	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2,D4,D5
	2	Asistensi Risk Management	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2
	3	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bimtek SPIP	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2,D4,D5
	4	Diagnostic Assesment pada Kementerian/Lembaga/Pemda	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2,D4,D5
	5	Pendampingan Implementasi SPIP pada Kementerian/Lembaga	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2
	6	Konsultasi SPIP pada Kementerian/Lembaga	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2,D4,D5
	7	Supervisi / Quality Assurance Bimtek SPIP pada Perwakilan BPKP	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2,D4,D5
	8	Evaluasi SPI Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyelenggaraan SPIP	D4
	9	Penilaian risiko	Penyelenggaraan SPIP	D4
	10	Kajian komparatif benchmarking penerapan SPIP	Penyelenggaraan SPIP	D4
	3	Sosialisasi SPIP		
	1	Sosialisasi SPIP pada Perwakilan RI di Luar Negeri	Penyelenggaraan SPIP	D2
	2	Sosialisasi Juknis Implementasi SPIP	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2,D4,D5
	3	Sosialisasi SPIP pada K/L/Pemda	Penyelenggaraan SPIP	D1,D2,D4,D5
	4	Penyusunan Kompilasi Laporan Sosialisasi SPIP pada Pemda	Penyelenggaraan SPIP	D4
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya)			
	8	PEMBINAAN SPIP MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SPIP		
	1	Pendidikan dan Pelatihan SPIP		
	1	Diklat SPIP	Rasio SDM terdiklat	Pusdiklat, Perwakilan
	9	PEMBINAAN SPIP MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR APIP		
	1	Diklat Fungsional Auditor APIP:		
	1	Penyelenggaraan Diklat bagi Itjen Kemen/LPNK	Rasio SDM terdiklat	Pusdiklat
	2	Penyelenggaraan Diklat bagi Inspektorat Daerah	Rasio SDM terdiklat	Pusdiklat
	3	Diklat Jabatan Fungsional Auditor (PNBP)	Rasio SDM terdiklat	Pusdiklat
	2	Workshops/Seminar		
	1	Workshops/Seminar (PNBP)	Rasio SDM terdiklat	Pusdiklat
	3	Penerapan JFA:		
	1	Pemetaan kondisi penerapan JFA	Penerapan JFA	Pusbin JFA
	2	Sosialisasi/Konsultasi/Bimtek penerapan JFA melalui workshop	Penerapan JFA	Pusbin JFA
	3	Fasilitasi Penerapan JFA	Penerapan	Pusbin JFA

				JFA	
		4	Ujian Sertifikasi JFA	Rasio SDM terdiklat	Pusdiklat
		4	Penguatan identitas profesi		
		1	Penguatan identitas profesi	Penerapan JFA	Pusbin JFA
		5	Fasilitasi Pengusulan Penyesuaian Tunjangan JFA/Perpanjangan Batas Usia Pensiun Auditor		
		1	Fasilitasi Pengusulan Penyesuaian Tunjangan JFA/Perpanjangan Batas Usia Pensiun Auditor	Penerapan JFA	Pusbin JFA
		6	Penerapan Tata Kelola APIP:		
		1	Penyusunan/penyediaan peraturan/pedoman tata kelola APIP	Tata Kelola APIP	Pusbin JFA
		2	Fasilitasi penyusunan/penyediaan/pendistribusian standarisasi/ pedoman teknis pengawasan	Tata Kelola APIP	Pusbin JFA
		3	Sosialisasi/Konsultasi/Bimtek Tata Kelola APIP dan Penerapan JFA	Tata Kelola APIP	Pusbin JFA
		4	Sosialisasi/Konsultasi/Bimtek pedoman <i>quality assurance</i> dan pedoman konsultasi	Tata Kelola APIP	Pusbin JFA
		5	Evaluasi penerapan tata kelola APIP/pelaksanaan <i>internal assessment</i>	Tata Kelola APIP	Pusbin JFA
		7	Pengembangan Profesi:		
		1	Fasilitasi kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan PPL	Tata Kelola APIP	Pusbin JFA
		2	Fasilitasi pengembangan kompetensi teknis substansi pengawasan	Tata Kelola APIP	Pusbin JFA
		8	Peningkatan Sertikasi Auditor		
		1	Peningkatan Jumlah Sertikasi Auditor	Kepuasan Auditor Bersertifikat	Pusbin JFA
		2	Fasilitasi rekrutmen Auditor belatar belakang pendidikan Akuntansi	Kepuasan Auditor Bersertifikat	Pusbin JFA
		3	Penyusunan peraturan e-sertifikasi	Kepuasan Auditor Bersertifikat	Pusbin JFA
		4	Pengembangan e - sertifikasi	Kepuasan Auditor Bersertifikat	Pusbin JFA
		5	Evaluasi penerapan JFA dan Mutu Sertifikasi Auditor	Kepuasan Auditor Bersertifikat	Pusbin JFA
		9	Penilaian Angka Kredit:		
		1	Fasilitasi penilaian angka kredit terpusat JFA APIP yang terbit	Kepuasan Auditor Bersertifikat	Pusbin JFA

		2	Pengembangan metode manajemen penilaian kinerja auditor (pengembangan metode PPAK)	Kepuasan Auditor Bersertifikat	Pusbin JFA
		3	Pengembangan sistem informasi angka kredit e-PPAK	Kepuasan Auditor Bersertifikat	Pusbin JFA
		4	Evaluasi Penilaian Angka Kredit	Kepuasan Auditor Bersertifikat	Pusbin JFA
	10	Sinergi Pengawasan:			
		1	Sinergi Pengawasan dengan APIP K/L	Permintaan Stakeholder	D2
		2	Penyusunan Pedoman Sinergi Pengawasan	Permintaan Stakeholder	D2
		3	Piloting Kegiatan Sinergi Pengawasan	Permintaan Stakeholder	D2
		4	Konsultasi/Bimtek Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada APIP	Permintaan Stakeholder	D1,D2,D4
	11	Pengelolaan Sistem Dukungan			
		1	Penyusunan Profil PASs Kementerian/Lembaga/Pemda	Sistem yang Dibangun	Pusinfo

TARGET PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BPKP TAHUN 2012
BERDASARKAN RENSTRA 2010-2014

A. PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SISITEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Berdasarkan Rencana Strategis BPKP 2010-2014 target *outcome* tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	TARGET 2012
1.	Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	%	73,75
2.	Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan	%	70
3.	Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden	%	68
4.	Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	%	81,67
5.	Tingkat opini BPK terhadap LKPP	%	80
6.	Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan	%	75
7.	Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh <i>stakeholders</i>	%	80
8.	Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP	%	82
9.	Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima	IPD	150
10.	BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik	%	55
11.	BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik	%	50
12.	BUMN yang kinerja PSO-nya baik	%	45
13.	Persentase penghematan biaya (<i>cost saving</i>) dibandingkan dengan nilai yang diaudit	%	7
14.	Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi	%	75
15.	IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko <i>fraud</i> yang mengimplementasikan FCP	Instansi	12
16.	IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan	Instansi	6
17.	Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan eskalasi	%	84
18.	persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum	%	85
19.	Hasil Audit Investigasi yang ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang	%	30

20.	Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar	%	85
21.	Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	%	10
22.	Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008	%	50

Adapun target output tahun 2012 berdasarkan Rencana Strategis BPKP 2010-2014 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR OUTPUT RENSTRA 2010-2014	SATUAN	TARGET 2012
1.	Laporan Pengawasan Lintas Sektor	Lap	1.417
2.	Laporan hasil pengawasan BUN	Lap	1.957
3.	Laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden	Lap	345
4.	Laporan Hasil Bimbingan Teknis/asistensi penyusunan LKKL/LKPD/LKBUMD	Lap	780
5.	Laporan Hasil reviu LKPP	Lap	1
6.	Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara	Lap	434
7.	Laporan hasil pengawasan atas permintaan <i>stakeholder</i>	Lap	309
8.	Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN	Lap	1.115
9.	Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah	Lap	945
10.	Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP	Lap	666
11.	Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat	Lap	218
12.	Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD	Lap	305
13.	Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN	Lap	2
14.	Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD	Lap	125
15.	Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat	Lap	59
16.	Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi	Lap	310
17.	Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP	Lap	142
18.	Laporan hasil kajian pengawasan	Lap	27
19.	Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim	Lap	134
20.	Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik	Lap	1.304
21.	Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya	Lap	103
22.	Laporan hasil peer review atas laporan penugasan investigasi	Lap	19
23.	Laporan hasil reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat	Lap	0
24.	Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang	KEP	5

	Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP		
25.	Jumlah peserta diklat SPIP	Orang	1.020
26.	Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP	KL, Pemda	115
27.	Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP	KL, Pemda	141
28.	Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah	Kegiatan	100
29.	Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah	Kegiatan	300
30.	Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah	Kegiatan	120

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA)

Berdasarkan Rencana Strategis BPKP 2010-2014 target kinerja lingkup kinerja outcome tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET 2012
1.	Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan	%	86
2.	Tingkat Penerapan Jabatan Fungsional Auditor	%	70
3.	Pencapaian Tatakelola APP yang baik	%	40
4.	Tingkat Persepsi kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor Bersertifikat	%	7,5
5.	Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)	%	90

Adapun target kinerja lingkup kinerja output tahun 2012 berdasarkan Rencana Startegis BPKP 2010-2014 adalah sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR OUTPUT RENSTRA 2010-2014	SATUAN	TARGET 2012
1.	Jumlah K/L dan Pemda yang mengimplementasi-kan Jabatan Fungsional Auditor	K/L/ Pemda	300
2.	Jumlah internal auditor yang tersertifikasi dan menjadi pejabat fungsional auditor	Orang	4.000
3.	Jumlah Auditor yang berlatar belakang pendidikan akuntansi	Orang	3.000
4.	Jumlah peraturan/pedoman tata kelola, pedoman quality assurance, pedoman konsultasi pada APIP	Dokumen	3
5.	Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan pedoman tatakelola, pedoman quality assurance, pedoman konsultasi dan APIP	Kegiatan	57
6.	Jumlah orang yang ikut pelatihan penerapan pedoman tatakelola, pedoman quality assurance, pedoman konsultasi dan APIP	Orang	700
7.	Jumlah unit internal auditor yang telah melakukan transparansi laporan hasil audit dan telah melakukan peer review	Unit	100

8.	Laporan evaluasi penerapan tatakelola, quality assurance, konsultasi pada APIP	Laporan	0
9.	Jumlah sertifikasi yang terbit	Sertifikat	1.740
10.	Jumlah penilaian angka kredit terpusat JFA APIP yang terbit	PAK	2.400
11.	Laporan evaluasi penerapan JFA	Laporan	4
12.	Penyediaan layanan informasi JFA	Kegiatan	5
13.	Jumlah rancangan yang disempurnakan-eksternal	Dokumen	1
14.	Jumlah Sistem yang Dibangun	Sistem	1